DEBAT KANDIDAT PRESIDEN DI PEMILU 2014

Balai Sarbini, Jakarta, 9 Juni 2014

TOPIK	**PRABOWO SUBIANTO (1)**	**JOKO WIDODO (2)**
Pembangunan Demokrasi	Bagi kami, demokrasi adalah hal yang harus kita perbaiki, kita pertahankan, dan kembangkan terus karena demokrasi cita-cita pendiri bangsa kita. Demokrasi yang kita miliki masih banyak kekurangan. Kita melihat demokrasi masih butuh budaya demokrasi, pendidikan politik. Rakyat baru merasakan memilih hak politik untuk ikut pemilu, tetapi belum merasakan betapa pentingnya hak politik itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab"	"Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Karena itu, setiap hari kami datang ke kampung-kampung, pasar-pasar, ke sungai-sungai, petani, pelelangan ikan karena ingin dengar suara rakyat dengan cara dialog"
Kinerja Pemerintahan	"Persoalan kinerja pemerintahan adalah persoalan uang. Ujung-ujungnya itu soal uang, karena itu penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manajerialnya, ini butuh investasi yang besar"	"Pembangunan sistem pemerintahan, kami lakukan dan buktikan melalui e-budgeting, e-government, e-catalog, e-audit, IMB online. Cara-cara seperti itu yang kita perlukan dan bisa dinasionalkan apabila kami diberi amanah"
Birokrasi dan Korupsi	"Korupsi terjadi karena para pejabat-pejabat yang berkuasa takut pensiun, gaji bupati sekitar 6-7 juta rupiah	"Pemerintahan yang bersih itu dapat berjalan dengan melakukan proses seleksi yang terbuka berdasarkan

	padahal saat kampanye habis 15 miliar rupiah,ini terjadi dimana-mana. Akibatnya dia ambl dari APBD. Kalau mau kurangi korupsi kita harus jamin kehidupan pejaba-pejabat negara, semua pejabat ditempat-tempat penting harus dijamin kualitas hidupnya"	kompetensi. Diseleksi bukan karena suka atau tidak suka, tapi melalui seleksi terbuka"
Kepemimpinan dalam Partai Politik		"Pola-pola lama di partai politik harus dirombak. Rekrutmen kepemimpinan dilakukan dengan mendorong siapa calon yang terbaik, dan bukan karena sekadar seseorang itu adalah pejabat ketua umum partai"
Koalisi Partai	"Tidak ada pengikut yang jelek, hanya ada pemimpin yang jelek. Jadi apabila kita sebagian pemimpin kita tegas meyakinkman para mitra anggota bahwa kita bergabung dengan syarat tidak akan merongrong anggaran negara baik APBN dan APBD satu sen pun. Ini adalah syarat saya terhadap mitra-mitra saya"	"Sejak awal dibangun dengan koalisi yang ramping, tanpa perlu banyak partai politik namun bekerja mengedepankan kepentingan rakyat. Jadi bukan bagi-bagi menteri dan kue di pemerintahan depan, namun koalisi kita ramping. Ini untuk menghindari agar tak hanya bagi-bagi kursi"
Biaya Politik dan Partisipasi Publik	"Biaya politik itu tidak bisa dihindarkan. Namun, dengan potensi ekonomi yang sangat besar, maka persoalan biaya mahal ini tak akan menjadi masalah asalkan bisa menggerakkan masyarakat dalam menyumbang dananya untuk partai politik"	"Saat kampanye membuka partisipasi ke masyarakat dalam bentuk rekening gotong royong. Sumbangan rakyat itu nantinya akan diaudit lembaga yang kredibel. Dengan itu, maka kami takkan bisa ditekan siapa pun, karena biaya kami transparan. Kami punya rekam jejak untuk itu"
Kebhinekaan	"Asas bhinneka tunggal ika adalah harga mati dan harus ditegakkan. Piranti hukum sudah cukup. UUD 1945 sudah sangat jelas. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai perwakilan	"Bhinneka Tunggal Ika bagi kami sudah final, jadi sebetulnya tidak ingin kami ungkit. Waktu mengangkat Lurah Susan di Lenteng Agung, melalui seleksi dan promosi terbuka baik

	minoritas yang didukung oleh Gerindra. Saya keras mempertahankan waktu ada serangan-serangan bahwa tidak mungkin minoritas menjadi wakil gubernur. Intinya adalah pendidikan, teladan unsur pimpinan. Saya tegaskan di sini dalam kegiatan sehari-hari terus-menerus memelihara suasana bhinneka tunggal ika dalam rekrutmen politik dan memberikan kesempatan politik"	manajerial, ladership, administrasi sudah dilalui semua. Kemudian ada yang protes dan demo karena agama mayoritas di sana berbeda dengan agama Lurah. Saya sampaikan bahwa itu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi"
Penegakan HAM	"Saya selama puluhan tahun adalah abdi negara, mencegah kelompok radikal mengancam keselamatan hidup orang yang tak bersalah. Jadi, manakala kita menghadapi kelompok perakit bom, ya mereka ini ancaman pada HAM, maka kewajiban seorang pembela negara adalah melindungi segala tumpah darah bangsanya. Saya pembela HAM paling keras, menjalankan tugas sebaik-baiknya, tapi yang menilai atasan"	
Pilkada		"Saya kira pemilihan langsung kepala daerah baik bupati, wali kota, maupun gubernur dilaksanakan seperti sekarang hanya teknisnya kita perbaiki. Dilaksanakan serentak untuk mengurangi biaya, baik di sebuah provinsi maupun di negara mungkin butuh transisi agak lama"
Hubungan Pusat dan Daerah	"Tak ada tantangan dari daerah jika sektor kebijakan berguna dan bermanfaat bagi rakyat banyak maka pemimpin daerah pun akan	"Mengapa daerah tidak mengikuti pusat? Sebenarnya, bisa membuat daerah mengikuti (pusat) dengan cara politik

	mengikuti. Jalan yang bagus, kereta api, masa rakyat tidak dukung pemerintah yang ingin berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Ujungnya, para penguasa yang tidak mengerti itu bisa diyakinkan untuk kerjasama, kita bekerja untuk kepentingan rakyat"	anggaran. Dengan politik anggaran bisa kendalikan daerah. Ada reward and punishment. Bisa DAK (Dana Alokasi Khusus) dipotong atau dikurangi, ini bisa membuat daerah ketakutan"
Pemekaran Daerah		"Inti pemekaran daerah adalah kemanfaatkan bagi masyarakat, bagi rakyat bagi warga bukan memberikan keuntungan bagi elite politik yang ada. Kita lihat sumber daya yang ada di sana, apakah rakyat mendapatkan manfaatnya ataukah elite-nya mendapatkan manfaat. Tentu saja juga masalah luas wilayah itu juga menjadi perhitungan. Karena daerah yang luas hanya dipegang bupati dalam melayani rakyatnya tidak akan efektif dan tidak akan efisien. Sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan. Jumlah penduduk juga harus menjadi pertimbangan"
Peraturan Daerah		"Terkait peraturan dan lembaga negara yang tumpang tindih, bisa dibentuk menjadi satu pintu melalui Sekretariat Negara. Sehingga keluarannya jelas. Kalau semua kementerian keluarkan, jelas akan banyak peraturan daerah yang tidak sinkron dengan pusat. Dengan satu pintu, bisa seiring sejalan dengan pemerintah pusat"

Sumber: antaranews.com | beritasatu.com | detik.com | kompas.com | liputan6.com | merdeka.com

Disusun: Tim **Almanak Pemilu 2014** | **@warungarsip**